

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ahmad Budianto

ahmadbudianto162000@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research was conducted at BPKAD, East Java province which is located at Johar street number 19-21 Surabaya. The research question was how economists, efficient, and effective of the financial performance of BPKAD, East Java province with financial performance measurement of value for money. Moreover, it aimed to find out the financial performance of BPKAD, East Java province with financial performance measurement of value for money which was considered from its economists, efficient, and effective aspects. The research was qualitative. Furthermore, the data were primary and secondary. Additionally, the instruments in data collection technique used documentation and interviews. The documents were in the form of a budget realization report during 2017-2020. Meanwhile, the interview was conducted for the budget division. The research result concluded that financial performance of BPKAD East Java province based on its economists aspect during 2017-2020 showed that, on average with a percentage of 92%, was economists since it lowered under 100%. While, from its efficiency aspect during 2017-2020 showed that, on average with a percentage of 99%, was efficient as it lowered under 100%. In addition, its effectiveness during 2017-2020 showed that, on average, a percentage of 104% was effective since it was higher than 100%.

Keywords: local budget and expenditure, value for money, economic, efficiency, effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Johar No 19-21 Surabaya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money*, apakah sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara, dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran periode 2017-2020, sedangkan wawancara ditujukan pada sub bidang anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ditinjau dari ekonomis pada periode 2017-2020 menunjukkan rata-rata dengan persentase 92% yang dinyatakan ekonomis karena persentase tersebut dibawah 100%, sedangkan ditinjau dari segi efisiensi pada periode 2017-2020 menunjukkan rata-rata sebesar 99% yang dinyatakan efisien karena persentase tersebut dibawah 100%, sedangkan ditinjau dari segi efektivitas pada periode 2017-2020 menunjukkan rata-rata dengan persentase sebesar 104% yang dinyatakan efektif karena persentase tersebut diatas 100%.

Kata Kunci: anggaran pendapatan dan belanja daerah, *value for money*, ekonomis, efisiensi, efektivitas

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah instansi yang bertugas dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan dan pembangunan di suatu daerah. Dengan adanya

pemerintahan daerah diharapkan roda perekonomian di suatu daerah berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan menyatakan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. APBD itu sendiri adalah sebuah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi komponen dalam pembiayaan, pendapatan, dan belanja daerah yang anggarannya ditetapkan oleh pemerintahan daerah yang penyusunannya harus meminta persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memudahkan tugas pemerintah untuk merencanakan sebuah pembangunan bagi suatu daerah, maka dari itu instansi pemerintah daerah terus melakukan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah agar kedepannya bisa lebih baik lagi

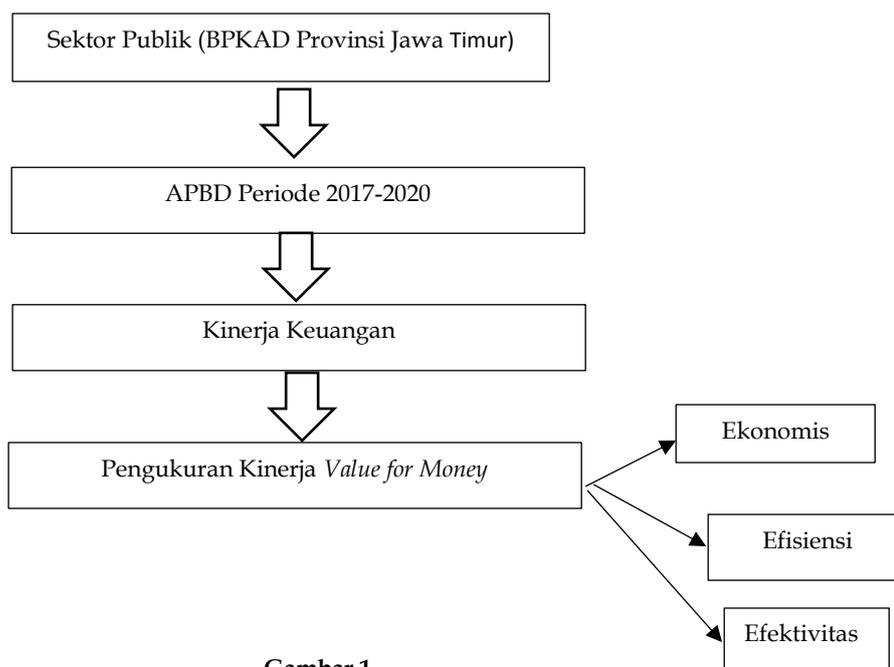
Bastian (2006: 274) menyatakan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan dan misi. Pengukuran kinerja sangat penting dalam suatu organisasi termasuk pemerintahan dengan adanya pengukuran kinerja bisa dibuat acuan untuk membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya alam dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dengan adanya pengukuran kinerja diharapkan pemerintah dapat fokus untuk sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan begitu efektivitas dan efisiensi kinerja bisa tercapai. Bastian (2006: 267) menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang ditetapkan dengan memperhatikan indikator input, output, outcome, manfaat, dan dampak maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan

Dalam mengukur kinerja dibagi menjadi dua yakni *value for money* dan *balance scorecard*. *Balance score card* pertama kali diperkenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersil sedangkan *value for money* pada sektor publik (Pratiwi dan Ela 2017: 11). Pada pengukuran kinerja metode *balance score card* ada 4 indikator yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Pratiwi dan Ela 2017: 11). *Value for money* adalah pengukuran kinerja sektor publik yang ditinjau berdasarkan segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Andriani (2012: 2) menyatakan prinsip *value for money* dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Desi Ratnasari yang berjudul "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan *Value for Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan". Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja yang baik dimana selama rentan waktu 2015-2019 ditinjau dari segi ekonomis menunjukkan rata-rata 88,6% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan ekonomis sedangkan jika ditinjau dari segi efektivitas dan efisien menunjukkan rata-rata sebesar 93% dan 66% yang menunjukkan kinerja keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan efektif dan efisien, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui kinerja keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang ditinjau dari indikator *value for money* apakah sama baiknya dengan kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan memenuhi 3 indikator *value for money* yakni ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money*, apakah sudah ekonomis?; (2) Bagaimanakah kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money*, apakah sudah efisien?; (3) Bagaimanakah kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money*, apakah sudah efektif?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis; (2) Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi; (3) Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengukuran kinerja keuangan *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas. Berikut ini rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Penelitian

TINJAUAN TEORITIS

Keuangan Daerah

Menurut PP No 58 Tahun 2005 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Dari kedua pengertian tersebut dapat di simpulkan keuangan daerah adalah segala bentuk kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah dianggap sebagai bagian dari kekayaan daerah yang kemudian oleh daerah tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Sebagaimana yang diatur dalam dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah; (2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas

pinjaman dari pihak ketiga; (3) Penerimaan daerah; (4) Pengeluaran daerah; (5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada pemerintahan daerah; (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau kepentingan umum

Peran Manajemen dalam Keuangan Daerah

Untuk menciptakan sebuah sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang berkualitas. Manajemen adalah faktor penting dalam berjalannya sebuah perencanaan dan pengorganisasian agar tercapai. Hendra *et al.*, (2020: 4) menyatakan beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yakni: (1) Taat pada peraturan perundangan dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundangan; (2) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan keluaran dengan hasil; (3) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; (4) Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah; (5) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasnya tentang keuangan daerah; (6) Bertanggung jawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan; (7) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif; (8) Kepatuhan adalah tindakan suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; (9) Manfaat maksudnya adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Sektor Publik

Sifat dan karakteristik yang paling menonjol adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya dimana sifat organisasi sektor publik organisasi non laba yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. *American Accounting Association* (1970) (dalam Renyowidjoyo, 2013: 9) menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik antara lain : (1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi (tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen); (2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif dan memungkinkan pegawai pemerintah melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (tujuan ini terkait dengan akuntabilitas).

Menurut Bastian (2010: 11) karakteristik sektor publik terdiri dari berikut ini dan penjelasannya: (1) Tujuan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan yang mendasar, serta kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani; (2) Aktivitas, pelayanan publik yang diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, penegak hukum, penyediaan pangan dan transparansi publik; (3) Sumber pembiayaan, berasal dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sebagai contoh adalah pajak dan retribusi yang merupakan perwujudan dari dana masyarakat, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah; (4) Pola pertanggung jawaban, bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, layaknya organisasi pemerintahan yang terdiri dari DPD, DPR, DPRD, serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu; (5) Kultur organisasi, bersifat formal serta birokrasi, dan berjenjang; (6)

Penyusunan anggaran, tentunya di dalam perencanaan atau penyusunan anggaran perlu melibatkan peran masyarakat secara langsung dengan cara mempublikasikan anggaran program publik dengan tujuan agar mampu dikritisi; (7) Stakeholder, terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia

Akuntansi Sektor Publik

Pengertian akuntansi menurut *America Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* (dalam Novi 2013: 1) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi - transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil - hasilnya. Sedangkan pengertian sektor publik menurut Renyowijoyo (2013: 2) menyatakan yakni suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.

Menurut kedua pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian akuntansi sektor publik tersebut yakni seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi yang keuangannya bersumber dari publik yang mengakibatkan harus menanggung konsekuensi untuk di pertanggung jawabkan kepada publik sehingga pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas agar publik bisa mengetahui kinerja sektor publik tersebut. Sedangkan menurut Renyowidjoyo (2013: 1) menyatakan akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik

Pendapatan Daerah

Abdul (2002: 64) menyatakan pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

Berdasarkan dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah segala bentuk penerimaan yang diterima suatu daerah melalui rekening kas umum daerah yang berdampak pada bertambahnya aktiva suatu daerah atau penurunan utang suatu daerah selama periode tersebut.

Belanja Daerah

IASC Framework (dalam Amin, 2019: 19) menyatakan belanja daerah adalah penurunan dalam manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplasi aset atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana, selain itu Sri (dalam Amin, 2019: 20) menyimpulkan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pengeluaran pemerintah daerah yang diambil dari kas daerah yang menimbulkan berkurangnya suatu aktiva

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2007 tentang keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tujuan belanja daerah dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut: (1) Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah; (2) Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik; (3) Sebagai alat untuk

memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjannya sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya; (4) Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran; (5) Sebagai alat untuk menampung, menganalisis, serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan; (6) Sebagai pedoman atau tolak ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, program, dan proyek yang dilakukan pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Abdul (2002: 24) menyatakan APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Abdul dan Muhammad (2019: 225) menyatakan APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah hingga kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang dapat dihindari.

Abdul (2002: 17) menyatakan karakteristik APBD adalah berikut ini: (1) APBD disusun oleh DPRD bersama kepala daerah; (2) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (*line item*) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran, penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran; (3) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD, penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemerintahan daerah tingkat satu dan kepala gubernur untuk pemerintahan daerah tingkat dua, oleh karena itu pertanggung jawaban tersebut bersifat vertical; (4) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit bersifat keuangan hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah; (5) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (unsur proyek-proyek daerah); (6) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Irham (2018: 142) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dapat dinilai baik apabila instansi tersebut dapat melaksanakan suatu kinerja keuangan dengan acuan mematuhi segala peraturan pelaksanaan keuangan yang telah ditetapkan

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2019: 60) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah gambaran mengenai seberapa baik atau

buruknya suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan memastikan bahwa kinerja tersebut sudah terukur dan nantinya di dapat hasil berupa apakah instansi tersebut dalam kinerjanya masuk dalam kriteria yang tergolong baik atau tidak ditinjau dari segi ekonomis, efektif, dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud yaitu: (1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah; (2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan; (3) Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Ulum (2004: 277) menyatakan bahwa manfaat dari pengukuran kinerja yakni sebagai berikut: (1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen; (2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; (3) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja; (4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward* dan *punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; (5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi; (6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; (7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; (8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Sujarweni (2015: 107-108) mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja bagi sektor publik adalah sebagai berikut: (1) Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik; (2) Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan; (3) Mewujudkan tanggung jawab publik; (4) Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan; (5) Mengalokasikan sumber daya; (6) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis; (7) Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik

Indikator Kinerja

Pada hakikatnya definisi dari ukuran kinerja dengan indikator kinerja berbeda dimana ukuran kinerja sendiri berhubungan dengan penilaian kinerja secara langsung sehingga bentuknya lebih cenderung ke arah kuantitatif. Sedangkan indikator mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yang berarti sifatnya hanya memfokuskan pada bidang yang dinilai butuh perbaikan kinerja (Ulum 2004: 287).

Pengukuran kinerja pada sektor publik metode yang digunakan adalah *value for money* yang ditinjau berdasarkan ekonomis, efektif, dan efisien. Sebelum didapatkan hasil yang menunjukkan apakah sektor publik dinyatakan ekonomis, efektif, dan efisien maka perlu mengkaji terlebih dulu dari sisi indikator *output*, *input*, dan *outcome*. Ulum (2004: 5) menjelaskan sebagai berikut: (1) *Input* adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh: dokter di Rs, tanah di jalan, guru di sekolah, dll. (2) *Output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. (3) *Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tertentu.

Peran indikator kinerja bagi sektor publik menurut Ulum (2004: 288) adalah sebagai berikut : (1) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi; (2) Untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan; (3) Sebagai masukan untuk menentukan skema manajerial; (4) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan penelitian; (5) Untuk menunjukkan standar kinerja; (6) Untuk menunjukkan efektivitas; (7) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran; (8) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan suatu biaya

Value for Money

Value for money adalah pengukuran kinerja yang mengacu pada 3 elemen yakni ekonomi, efektif, dan efisien dalam pengukuran *value for money* mempunyai tujuan untuk memperoleh *input* terendah dan mencapai output yang maksimal (Mardiasmo, 2009: 10). Ardilla (dalam Riadi, 2020: 1) menyatakan bahwa *value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat diinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Dari kedua istilah *value for money* dapat disimpulkan bahwa *value for money* adalah suatu konsep untuk menilai suatu kinerja sektor publik yang berdasarkan atas elemen ekonomi, efektif, dan efisien agar mengetahui seberapa baik suatu organisasi sektor publik tersebut dalam mencapai target dari suatu program yang telah disusun sebelumnya.

Tujuan yang diinginkan masyarakat melalui pelaksanaan *value for money* adalah ekonomi, efektif, dan efisien dimana ekonomi berarti hemat dan cermat dalam bidang pengadaan dan alokasi sumber daya sehingga dapat menghindari pemborosan suatu biaya. Efisien berarti berjalan secara tepat sasaran dalam meminimalkan penggunaan sumber daya dan memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan efektif berarti berhasil mencapai target sesuai rencana yang ditetapkan. Mardiasmo (2009: 124) mengatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja *value for money* bagi organisasi sektor publik adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; (2) Meningkatkan mutu pelayanan publik; (3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*; (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik

Dalam mengukur kinerja *value for money* diperlukan langkah-langkah pengukuran *value for money* terdiri dari:

Pengukuran Ekonomis

Ulum (2004: 271) mengatakan ekonomi adalah pemrolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Menurut Mahmudi (2010: 82) mengatakan ekonomi memiliki kaitan dengan kegiatan pengelolaan *input* primer yang berupa sumber daya keuangan atau uang dan kas, kemudian dikelola menjadi *input* sekunder menjadi berbagai hal operasional seperti barang dan modal, bahan dan infrastruktur, serta tenaga kerja. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan kinerja keuangan organisasi sektor publik berdasarkan pengukuran *value for money* dari segi ekonomis sesuai dengan kriteria menurut Mahsun (2013: 186) adalah sebagai berikut: (1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis; (2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis berimbang; (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis

Pengukuran Efisiensi

Ulum (2004: 271) mengatakan efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Menurut Mahmudi (2010: 85) efisiensi memiliki keterkaitan dengan *output* berupa pelayanan atau barang dimana pelayanan atau barang tersebut merupakan hasil dari sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan kinerja keuangan organisasi sektor publik berdasarkan pengukuran *value for money* dari segi efisiensi sesuai dengan kriteria menurut Mahsun (2013: 186) adalah sebagai berikut: (1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti efisien; (2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisien berimbang; (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efisien

Pengukuran Efektivitas

Menurut Ulum (2004: 272) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Mahmudi (2010: 272) mengatakan efektivitas memiliki kaitan dengan hasil yang didapatkan dengan hasil yang diharapkan tercapai. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan kinerja keuangan organisasi sektor publik berdasarkan pengukuran *value for money* dari segi efektivitas sesuai dengan kriteria menurut Mahsun (2013: 186) adalah sebagai berikut: (1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka tidak efektif; (2) Jika diperoleh sama dengan 100% maka efektif berimbang; (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka efektif

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2014: 4) mengatakan pendekatan kualitatif yakni prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang yang diamati.. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer menurut Sujarweni (2019: 89) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui; kuisisioner kelompok fokus, dan panel atau data hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur adalah organisasi pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk melayani masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada perbandingan data dimana data tersebut di dapatkan dari teori-teori yang berkaitan pada penelitian tersebut yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang diteliti setelah itu dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari sebuah konsep teori yang sudah dipelajari. Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana data yang diambil penelitian ini yakni berupa wawancara dan dokumentasi yang diolah dan dihitung menggunakan rasio guna peneliti mendapatkan gambaran berupa kondisi kinerja keuangan instansi tersebut, hasil perhitungan tersebut kemudian oleh peneliti disusun dalam bentuk analisis deskriptif yang tujuannya untuk mendeskripsikan makna dari angka-angka dari perhitungan tersebut. Berikut ini langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini adalah; (1) Pengumpulan data, pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah laporan realisasi anggaran yang diperoleh

dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. (2) Reduksi data, dalam penelitian ini peneliti fokus untuk mengkaji pada laporan realisasi anggaran. Hal yang dilakukan peneliti yakni mengklarifikasi data realisasi anggaran tersebut kemudian mengolah dan menghubungkan semua data tersebut dengan teori yang ada. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode *value for money* yang dihitung menggunakan indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan menggunakan data yang diperoleh. (3) Penyajian data, setelah data terkumpul peneliti melakukan penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini berupa analisis dalam bentuk uraian singkat sehingga peneliti dapat menguasai data tersebut. (4) Penarikan kesimpulan, langkah terakhir teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai metode pengukuran kinerja *value for money* pada instansi BPKAD yang ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

Satuan Kajian

Satuan kajian itu sendiri terkait dengan penelitian kualitatif yang merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Satuan kajian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah, pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah daerah kota dan pemerintah daerah provinsi. Tugas pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi yang dimaksud peneliti adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; (2) Laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi informasi mengenai realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah, transfer, surplus/defisit pembiayaan, sisa lebih /kurang pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dalam satu periode

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan *Value for Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dari Segi Ekonomis

Ekonomis sendiri mempunyai arti yakni aktivitas untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang rendah dari harga wajar. Pengukuran ekonomis dalam kinerja keuangan adalah dengan membandingkan anggaran belanja yang ditetapkan dengan realisasinya. Kinerja organisasi dinyatakan ekonomis apabila realisasi pengeluaran lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan dan mencapai output yang maksimal. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

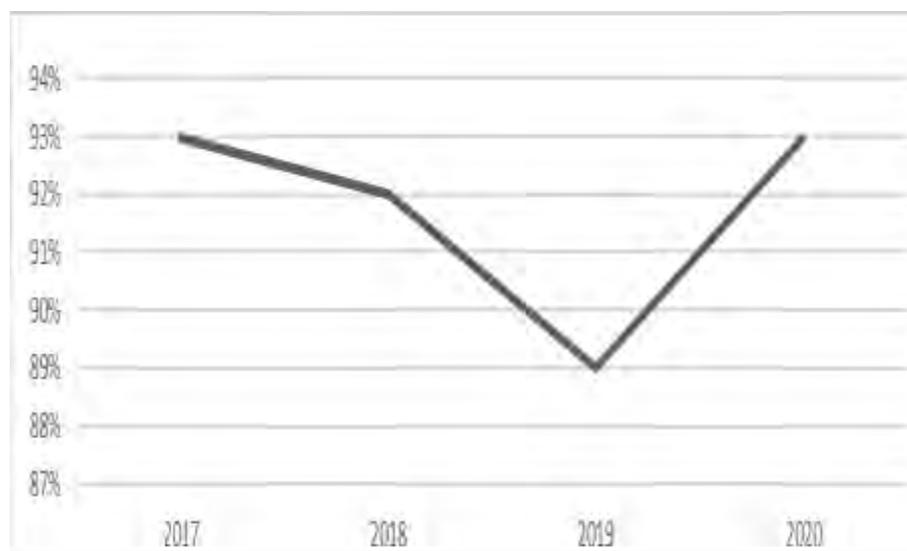
Berikut ini adalah tabel perhitungan rasio ekonomis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Keuangan
BPKAD Provinsi Jawa Timur dari Segi Ekonomis Periode 2017-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	30.937.109.134.349,56	28.878.134.635.610,34	93%	Ekonomis
2018	33.245.888.781.196,70	30.662.093.021.869,82	92%	Ekonomis
2019	38.004.721.350.292,36	33.967.109.632.815,13	89%	Ekonomis
2020	34.565.028.403.219,39	32.286.757.637.609,27	93%	Ekonomis

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah, 2022

Hasil pada Tabel 1 tersebut diperoleh dari laporan realisasi anggaran yang di publikasi periode 2017-2020 kemudian laporan realisasi anggaran tersebut diolah dan menghubungkan dengan teori yang ada. Berikut ini grafik perkembangan kinerja keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur dari segi ekonomis.



Gambar 2
Grafik Kinerja Keuangan BPKAD Ditinjau dari Segi Ekonomis
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 terlihat pemerintah daerah dalam kurun 2017-2020 dinyatakan ekonomis karena kriteriannya berada di bawah 100%. Pada tabel tersebut kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari segi ekonomis mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017 sebesar 1% menjadi 92% dinyatakan ekonomis, faktor yang menyebabkan penurunan persentase tersebut adalah bertambahnya anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana pada tahun 2017 anggaran belanja ditetapkan sejumlah 30.937.109.134.349,56 meningkat menjadi 33.245.888.781.196,7. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 3% menjadi 89% dinyatakan ekonomis, faktor yang menyebabkan penurunan persentase tersebut adalah kembali bertambahnya anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana pada tahun 2018 sebesar 33.245.888.781.196,7 menjadi 38.004.721.350.292,36 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun 2019 sebesar 4% menjadi 93% dinyatakan ekonomis faktor penyebab kenaikan tersebut adalah berkurangnya anggaran belanja yang ditetapkan pemerintah daerah dimana pada tahun 2019 sebesar 38.004.721.350.292,36 berkurang menjadi 34.565.028.403.219,39 pada tahun 2020. Semakin besar persentase kinerja keuangan ditinjau dari segi ekonomis maka dapat dikatakan semakin baik.

Ekonomis terjadi karena Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat meminimalisir anggaran atau kas yang merupakan *input* primer menjadi *input* yang bersifat sekunder seperti infrastruktur, SDM, dan barang modal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pada pengeluaran yang produktif dan hemat

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan *Value for Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dari Segi Efisiensi

Pengukuran efisiensi dalam kinerja keuangan adalah dengan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan yang diterima. Kinerja suatu

organisasi dinyatakan efisien apabila jumlah biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada jumlah pendapatan yang diterima. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

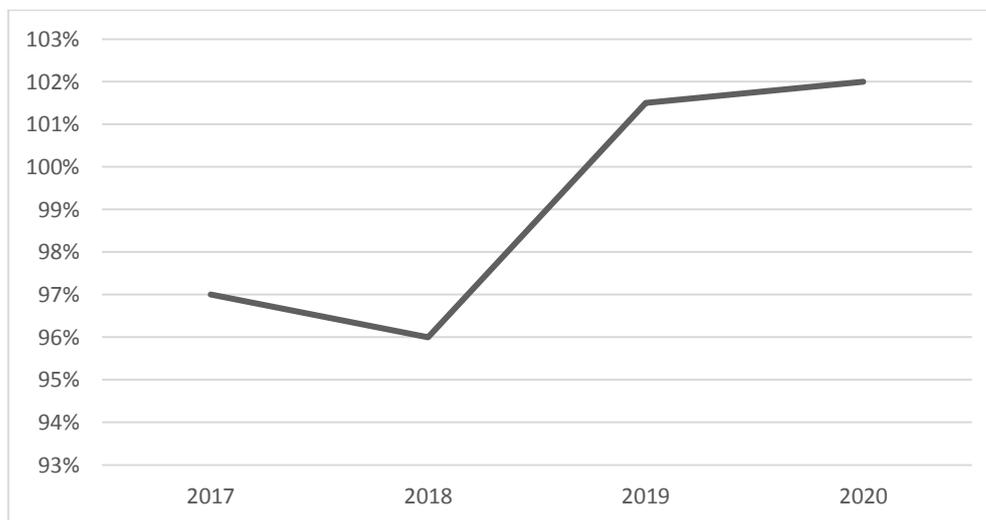
Berikut ini adalah tabel perhitungan rasio efisiensi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Tabel 2
Pengukuran Kinerja Keuangan
BPKAD Provinsi Jawa Timur dari Segi Efisiensi Periode 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Persentase	Kriteria
2017	28.878.134.635.610,34	29.864.031.011.506,22	97%	Efisien
2018	30.662.093.021.869,82	31.939.187.379.442,58	96%	Efisien
2019	33.967.109.632.815,13	33.455.209.327.987,57	101,5%	Tidak efisien
2020	32.286.757.637.609,27	31.631.024.771.618,29	102%	Tidak efisien

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah, 2022

Hasil pada Tabel 2 tersebut diperoleh dari laporan realisasi anggaran yang di publikasi periode 2017-2020 kemudian laporan realisasi anggaran tersebut diolah dan menghubungkan dengan teori yang ada. Berikut ini grafik perkembangan kinerja keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur dari segi efisiensi.



Gambar 3
Grafik Kinerja Keuangan BPKAD Ditinjau dari Segi Efisiensi
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Pada Tabel 2 pemerintah daerah dalam kurun 2017-2020 dinyatakan efisien dan tidak efisien karena kriteria pada 2017 dan 2018 berada di bawah 100%, sedangkan pada 2019 dan 2020 berada di atas 100%. Pada tabel tersebut kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari segi efisiensi mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017 sebesar 1% menjadi 96% dan dinyatakan efisien faktor penurunan persentase tersebut adalah karena adanya kenaikan dari pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dari tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 4,05% menjadi 101,5% dan dinyatakan tidak efisien kenaikan tersebut

disebabkan oleh faktor kembali meningkatnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pendapatan yang diterima dari tahun 2018 tetapi biaya yang dikeluarkan nominalnya lebih besar dari pendapatan yang diterima hal tersebut yang menyebabkan ketidakefisienan terjadi pada tahun 2019 . Pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,5% menjadi 102% dinyatakan tidak efisien faktor kenaikan tersebut disebabkan karena pemerintah daerah menurunkan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari tahun 2019 dan mengulangi hal yang menyebabkan ketidakefisienan terjadi yakni biaya yang dikeluarkan nominalnya lebih besar dari pendapatan yang diterima. Semakin kecil persentase kinerja keuangan ditinjau dari segi efisiensi maka dapat dikatakan semakin baik.

Penyebab ketidakefisienan kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 - 2020 karena terjadi pemborosan belanja operasional yang didominasi oleh belanja hibah. Belanja hibah adalah bantuan pemerintah yang diberikan secara sukarela kepada lembaga lainnya, yang menjadi persoalan adalah karena pemberian dana hibah tersebut bersifat tertutup yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan dana hibah tersebut.

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan *Value for Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dari Segi Efektivitas

Efektivitas bisa diartikan sebagai gambaran mengenai dampak (*outcome*) dari suatu *output* mengenai tercapainya suatu program. Dalam hal ini pengukuran efektivitas dalam kinerja keuangan yakni perbandingan antara anggaran pendapatan yang ditetapkan oleh suatu organisasi dengan realisasinya. Kinerja keuangan organisasi sektor publik dinyatakan efektif apabila realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran pendapatan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

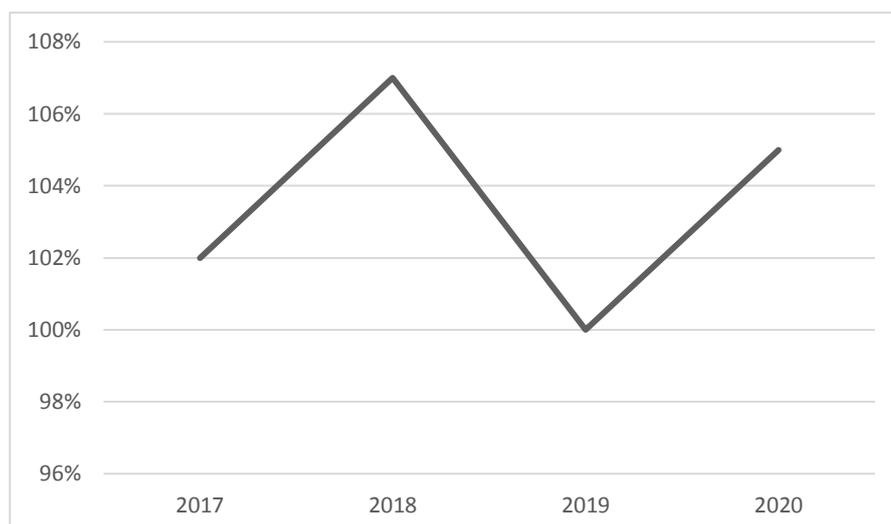
Berikut ini adalah tabel perhitungan rasio efisiensi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Tabel 3
Pengukuran Kinerja Keuangan
BPKAD Provinsi Jawa Timur dari Segi Efektivitas Periode 2017-2020

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	29.348.605.270.584,19	29.864.031.011.506,22	102%	Efektif
2018	29.959.091.907.455,47	31.939.187.379.442,58	107%	Efektif
2019	33.427.673.068.552,55	33.455.209.327.986,57	100%	Efektif berimbang
2020	30.142.938.913.337	31.631.024.771.618,29	105%	Efektif

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah, 2022

Hasil pada Tabel 3 tersebut diperoleh dari laporan realisasi anggaran yang di publikasi periode 2017-2020 kemudian laporan realisasi anggaran tersebut diolah dan menghubungkan dengan teori yang ada. Berikut ini grafik perkembangan kinerja keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur dari segi efektivitas.



Gambar 4
Grafik Kinerja Keuangan BPKAD Ditinjau dari Segi Efektifitas
 Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 pemerintah daerah dalam kurun 2017-2020 dinyatakan efektif dan efektif berimbang karena kriteria pada tahun 2017, 2018, dan 2020 kriterianya diatas 100% tergolong efektif , sedangkan pada tahun 2019 kriterianya 100% tergolong efektifitas berimbang. Pada tabel tersebut kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari segi efektifitas mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 terjadi kenaikan dari tahun 2017 sebesar 5% menjadi 107% dan dinyatakan efektif, pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 7% menjadi 100% dan dinyatakan efektif berimbang, pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun 2019 sebesar 5% menjadi 105% dinyatakan efektif. Kenaikan persentase efektifitas pada tahun 2018 disebabkan oleh faktor pemerintah daerah yang meningkatkan anggaran pendapatan yang ditetapkan dari tahun 2017 selain itu pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan lebih dari anggaran yang ditetapkan kurang lebih 2 triliun dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase yang disebabkan oleh faktor pemerintah daerah yang meningkatkan anggaran pendapatan yang ditetapkan dari tahun 2018 yang realisasinya lebih besar tetapi pemerintah daerah tidak bisa menjaga realisasi sebesar 2 triliun pada tahun 2018 yang hanya berhasil merealisasikan pendapatan kurang lebih 27 miliar dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan karena pemerintah daerah mengurangi anggaran pendapatan yang ditetapkan dari tahun 2019 dan mengulangi keberhasilan merealisasikan pendapatan kurang lebih sebesar 2 triliun dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020. Semakin besar persentase kinerja keuangan ditinjau dari segi efektifitas maka dapat dikatakan semakin baik.

Keefektifan kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur terjadi karena tercapainya program yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini yang mempengaruhi keefektifan kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah komponen pendapatan asli daerah dikarenakan pendapatan asli daerah mempunyai kontribusi terbesar setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya jumlah perusahaan setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya pendapatan pajak daerah yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dari sisi pendapatan pajak daerah yang berakibat pada penurunan dari sisi pendapatan daerah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Segi Ekonomis, pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2017-2020 memiliki rata-rata dengan persentase 92% yang tergolong ekonomis yang mengindikasikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dapat mengelola anggaran untuk mencapai pengeluaran seminimal mungkin; (2) Segi Efisiensi, pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2017-2020 memiliki rata-rata dengan persentase 99 % yang tergolong efisien meskipun hasil yang didapat tidak terlalu signifikan yang mengindikasikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola belanja dan pendapatan daerah telah memenuhi syarat efisien karena hasil yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan; (3) Segi Efektivitas, pengukuran kinerja keuangan dari segi efektivitas pada tahun 2017-2020 memiliki rata-rata dengan persentase 104% yang tergolong efektif yang mengindikasikan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur program yang ditetapkan terealisasi dengan baik yang ditunjukkan pada realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya pendapatan asli daerah yang didominasi oleh pendapatan pajak daerah

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, yang menggunakan tema yang sama untuk menambah periode tahun pada data laporan realisasi anggaran agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan; (2) Bagi instansi, berdasarkan pada pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi, walaupun memiliki rata-rata yang layak namun hasilnya tidak signifikan maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan realisasi belanja daerah seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal seperti menetapkan anggaran belanja daerah yang tidak terlalu tinggi, sedangkan dari segi ekonomis dan efektivitas pada pengukuran kinerja keuangan harus terus mempertahankan kinerja yang terbilang baik karena anggaran belanja yang ditetapkan lebih besar dari realisasinya yang artinya pemerintah daerah berhasil mengurangi pengeluaran yang tidak perlu begitu juga dalam realisasi pendapatan yang diterima lebih besar dari anggaran yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Seri Bunga Rampai UUP AMP YMPN. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama. Salemba Empat. Jakarta
- _____ dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelola Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Amin, F. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Andriani, Sri. 2012. Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip *Value for Money* Pemerintah Kota Batu. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 3(1):1-22.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Hendra Harmain, Aqwa Naser Daulay, dan Debby Tamara Enre. 2020. Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(2):1-23.
- Irham, Fahmi. 2018. *Manajemen Kinerja*. Alfa Beta. Bandung.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2019. *Manajemen Kinerja Keuangan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Mahsun, Mohammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Novi, Priyati. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 *Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pratiwi, Amelia Ika, and Ela Nursandia. 2017. Analisis Pengukuran Kinerja *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. *Jurnal VOK@SINDO* 5(2):10-20
- Riadi, Muhammad. 2020. *Value for Money; Definisi, Manfaat, Indikator, dan Pengukuran*. Kajian Pustaka.Com. (<https://www.jojonomic.com/blog/value-for-money/>). Diakses tanggal 24 Oktober 2021
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Sujarweni, V. Wiratn. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Edisi Pertama. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta.